

PENILAIAN INDEK E-GOVERNMENT PADA DINKES KOTA PALEMBANG**Fery Antony¹⁾, Rendra Gustriansyah²⁾, Ryan Ramanda Putra³⁾**^{1), 3)}Program Studi Teknik Komputer Universitas Indo Global Mandiri²⁾Program Studi Informatika Universitas Indo Global Mandiri

Jl Jend. Sudirman No. 629 KM. 4 Palembang Kode Pos 30129

Email : feryantony@uigm.ac.id¹⁾, rendra@uigm.ac.id²⁾, rian@uigm.ac.id³⁾**ABSTRACT**

Ranking of e-Government of Indonesia (PEGI) is a model developed by the Directorate of e-Government, the Directorate General of Telematics Applications, Ministry of Communication and Information Technology (Ministry KOMINFO) to view a map of the condition of usage of Information Technology and Communication Technologies (ICT) by government agencies nationwide. In this paper, the authors have assessed the use of ICT in the health office (DHO) of the city of Palembang as a government agency in order to facilitate the flow of information and improve the quality of service to the community by using a model approach PEGI. Palembang city health office has e-government index amounted to 1,426, which means the use of ICT in dinkes indikator Palembang city already exists, but is still lacking in terms of quantity and quality. Recommendations are given to dinkes Palembang to increase the index of e-governement it was the preparation of the Master Plan for Information Technology (RITI), preparation of the scale of the policy priorities of ICT implementation, increasing the number of staff in the section on data and health information with a background in IT, the addition of human resources development program with sending employees on section data and health information for training or education in the field of IT and Disaster Recovery planning.

Keywords : e-government, e-governement index

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi boleh dikatakan sebagai faktor penentu suksesnya industrialisasi, perdagangan, dan penciptaan efisiensi perusahaan-perusahaan transnasional. Hal ini menjadi pengaruh paradigma baru sektor publik [1]. Paradigma baru di sektor publik terjadi disebabkan karena keberhasilan sektor privat / bisnis dalam melakukan inisiatif dan kreativitas sehingga produktivitas, efisiensi, dan efektivitasnya jauh lebih berkembang dibandingkan dengan sektor publik. Salah satu faktor kesuksesan sektor privat adalah penggunaan teknologi canggih dalam sistem informasi manajemen yang sering disebut dengan *e-business*. Pada dasarnya tugas umum pemerintah adalah melayani masyarakat yang di dalamnya berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyebaran data maupun informasi yang penting bagi masyarakat. Dalam konteks ini, Teknologi Informasi (IT) akan sangat berperan didalamnya. Dinas Kesehatan (dinkes) kota Palembang sebagai instansi pemerintah yang mengemban fungsi sebagai penyedia layanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam perkembangannya dinkes kota Palembang melakukan inovasi dalam meningkatkan kualitas layanannya, termasuk penggunaan teknologi komunikasi dan informasi (TIK). Peningkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) adalah suatu model yang dibuat oleh Direktorat *e-Government*, Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian KOMINFO) yang dapat digunakan sebagai solusi untuk menganalisis *e-Government*. PeGI memiliki lima dimensi *assessment* yang akan dikaji. Kelima dimensi tersebut adalah

kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta meningkatkan profesionalisme kinerja dinkes kota Palembang dalam rangka memperlancar arus informasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2. Peningkatan e-Government Indonesia (PeGI)

Peningkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) merupakan kegiatan yang diadakan oleh Direktorat *e-Government*, Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian KOMINFO) yang melibatkan instansi-instansi Pemerintah di seluruh wilayah Indonesia [2]. Kegiatan PeGI diadakan untuk melihat peta kondisi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh lembaga pemerintah secara nasional. Harapan dari PeGI ini adalah untuk meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan TIK di lembaga pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. PeGI mempunyai tiga tujuan utama, yaitu [3] :

1. Memberikan acuan pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah.
2. Mendorong peningkatan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang, dan obyektif.
3. Mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah secara nasional.

Terkait dengan tujuan pertama, PeGI dirancang agar dapat menjadi pedoman bagi pengembangan TIK di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, diharapkan

lingkungan pemerintah di Indonesia baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun kementerian dan lembaga non-kementerian dapat mengembangkan dan memanfaatkan TIK secara lebih terarah.

Sehubungan dengan tujuan kedua, PeGI diharapkan meningkatkan motivasi seluruh instansi pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan TIK dalam melayani masyarakat, pelaku bisnis, dan lembaga pemerintah. Evaluasi yang utuh berarti lengkap meliputi semua aspek yang memberikan kontribusi bagi suksesnya pengembangan dan implementasi *e-government*, bukan hanya aspek-aspek yang mewakili kepentingan tertentu saja. Evaluasi seimbang berarti memberikan bobot yang sama dan sesuai sehingga tidak mengurangi arti penting dari satu aspek yang mengurangi akurasi hasil evaluasi. Evaluasi yang obyektif berarti menghindari dan mengurangi subyektivitas yang akan dapat mengganggu kepercayaan hasil evaluasi.

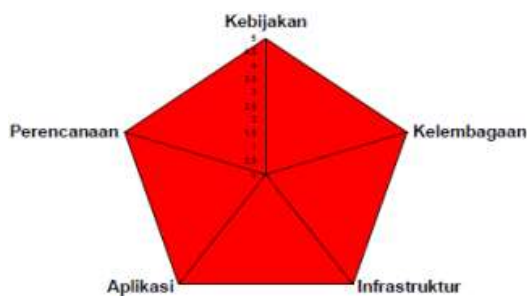
Sebagai tujuan ketiga, dengan melibatkan seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, maka diharapkan hasilnya dapat menggambarkan status pengembangan TIK secara nasional. Dengan demikian dapat diketahui kekuatan dan kelemahan seluruh peserta (instansi) yang nantinya sangat berguna untuk pengembangan TIK di masa datang.

Penelitian tentang implementasi *e-Government* pernah dilakukan oleh [4]. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi pendorong bagi pemerintah Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah untuk meningkatkan kualitas kinerja. *e-Government* menjadi salah satu cara mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Seiring perkembangan *egovernment*, beberapa kabupaten/kota di Indonesia menjadi rujukan pengembangan *e-government* bagi daerah lain, menyusul sejumlah manfaat nyata yang didapat dari penerapan *e-government*. Tentunya beragam faktor turut mempengaruhi keberhasilan implementasi *e-government*.

3. Dimensi PeGI

PeGI memiliki lima dimensi penilaian sebagaimana terlihat pada gambar 1.

Dalam pelaksanaan pemeringkatan, ditentukan lima dimensi yang dikaji yaitu: kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Masing-masing dimensi itu nantinya memiliki bobot yang sama dalam penilaian karena semuanya penting, saling terkait dan saling menunjang antara satu dengan yang lainnya [3].



Gambar1. Lima Dimensi Penilaian PeGI

3.1. Kebijakan

Dimensi kebijakan berkaitan erat dengan produk hukum dan juga dokumen resmi yang bertujuan untuk memberi arah dan mendorong pemanfaatan TIK yang terdiri dari:

- Manajemen/proses kebijakan (terkait TIK) yang dilaksanakan.
- Visi dan misi yang dijabarkan dengan jelas dan terdokumentasi dalam bentuk surat keputusan, peraturan, regulasi, kebijakan, pedoman, rencana strategis, atau bentuk dokumen resmi lainnya.
- Strategi penerapan kebijakan TIK yang dituangkan dalam bentuk rencana kerja, program, atau bentuk dokumen resmi lainnya.
- Standar atau panduan yang berkaitan dengan pemanfaatan TIK secara umum maupun secara spesifik dalam bidang-bidang tertentu.
- Peraturan terkait dengan pemanfaatan TIK untuk menjamin kelangsungan program pengembangan dan pemanfaatan TIK.
- Keputusan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait penerapan kebijakan TIK.
- Skala Prioritas penerapan TIK yang dilaksanakan suatu daerah.
- Evaluasi/manajemen risiko TIK yang diterapkan.

3.2. Kelembagaan

Dimensi kelembagaan terkait erat dengan keberadaan organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengembangan dan pemanfaatan TIK dengan indikator:

- Keberadaan organisasi struktural yang lengkap sehingga dapat menjalankan fungsi *Chief Information Officer* (CIO), dukungan teknis, dan fungsi lain dengan baik.
- Adanya dokumen yang memberikan rumusan yang jelas mengenai tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI)
- Adanya sistem dan prosedur kerja yang lengkap dan terdokumentasi untuk melaksanakan hal-hal yang terkait dengan pemanfaatan dan pengembangan TIK.
- Adanya kelengkapan unit dan aparatur untuk mendukung pemanfaatan dan pengembangan TIK yang memadai dari segi jumlah, kompetensi, jenjang karir, maupun status kepegawaian.
- Adanya program pengembangan sumber daya Manusia TIK yang terencana dan terlaksana.

3.3. Infrastruktur

Dimensi infrastruktur berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan TIK yang terdiri dari :

- *Data center* dan aplikasi pendukungnya.
- Jaringan Data (LAN, WAN, Internet).
- Keamanan yang terencana dan terevaluasi.
- Fasilitas pendukung seperti antara lain AC, UPS, *Genset*, serta sarana pengamanan fasilitas lainnya.
- Dokumen *Disaster Recovery* yang diperlukan jika terjadi kegagalan sistem.
- Pemeliharaan infrastruktur TIK.
- Inventarisasi peralatan TIK.

3.4. Aplikasi

Dimensi aplikasi berkaitan dengan ketersediaan dan dimanfaatkannya piranti lunak aplikasi yang memenuhi kriteria antara lain :

- Adanya situs web (*homepage*).
- Adanya Aplikasi fungsional utama 1 (Pelayanan Publik).
- Adanya Aplikasi fungsional utama 2 (Administrasi & Manajemen Umum).
- Adanya Aplikasi fungsional utama 3 (Administrasi Legislasi).
- Adanya Aplikasi fungsional utama 4 (Manajemen Pembangunan).
- Adanya Aplikasi fungsional utama 5 (Manajemen Keuangan).
- Adanya Aplikasi fungsional utama 6 (Manajemen Kepegawaian).
- Dokumentasi setiap aplikasi yang dimiliki.
- Inventarisasi seluruh aplikasi TIK.
- Interoperabilitas setiap aplikasi yang diterapkan.

Aplikasi tersebut haruslah mendukung fungsi dasar umum sistem pemerintahan yang terdiri dari antara lain :

1. Pelayanan publik, seperti kependudukan, perpajakan dan retribusi, pendaftaran dan perijinan, bisnis dan investasi, pengaduan masyarakat, publikasi informasi umum dan pemerintahan, dan lain-lain.
2. Administrasi dan manajemen umum yang meliputi surat elektronik, sistem dokumen elektronik, sistem pendukung keputusan, kolaborasi dan koordinasi, manajemen pelaporan pemerintahan, dan lain-lain.
3. Administrasi legislasi yang meliputi aplikasi sistem katalog hukum, peraturan perundangan, dan lain-lain.
4. Manajemen pembangunan yang meliputi sistem perencanaan pembangunan daerah, sistem pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dan monitoring proyek, sistem evaluasi dan informasi hasil pembangunan, sistem laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
5. Manajemen keuangan, meliputi aplikasi anggaran, kas dan perbendaharaan, akuntansi daerah, dan lain-lain.
6. Manajemen kepegawaian yang meliputi aplikasi penerimaan pegawai, absensi, penggajian, penilaian kinerja, pendidikan dan latihan, dan lain-lain.

3.5. Perencanaan

Dimensi perencanaan berkaitan dengan proses perencanaan dengan indikator antara lain: adanya organisasi yang melakukan perencanaan TIK, adanya sistem perencanaan untuk pengembangan dan pemanfaatan TIK yang dilakukan secara nyata, adanya *dokumentasi Master Plan* yang lengkap, yang mengandung unsur lima dimensi PeGI, Implementasi dari *Master Plan* yang sudah dibuat, serta adanya anggaran yang tertuang dalam RPJMN/RPJMD dan RKP/RKPD.

2. Pembahasan

1. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan penilaian penilaian e-Government Indonesia, langkah – langkah yang dilakukan adalah:

1. Mengumpulkan indikator dari 5 dimensi dari dalam materi presentasi atau materi pendukung, yang berbentuk antara lain: Dokumen (naskah, foto, film, bagan dan lain-lain), halaman web, Laporan , buku-buku panduan dan pedoman. Indikator diharapkan menggambarkan Sumber daya, Fasilitas dan Proses/mechanisme kerja.
2. Melakukan wawancara kepada kepala seksi data dan informasi kesehatan untuk mengetahui kondisi pemanfaatan TIK di dinkes kota Palembang.
3. Peneliti melakukan inventarisasi, pemeriksaan dan penilaian terhadap indikator di atas dan relevansinya terhadap pengembangan dan penerapan e-government di lingkungan dinkes kota Palembang.
4. Penyusunan laporan hasil asesmen.

2. Panduan Umum Penilaian

Secara umum penilaian terhadap tata kelola *e-Government* Indonesia [3] adalah sebagai berikut :

- a. Nilai 1,0 sampai dengan 1,49 (sangat kurang) Indikator tidak ada sama sekali atau sangat kurang dari segi jumlah dan kualitas
- b. Nilai 1,5 sampai dengan 2,49 (kurang) Indikator sudah ada namun masih perlu ditambah dari segi jumlah dan ditingkatkan secara kualitas
- c. Nilai 2,5 sampai dengan 3,49 (baik) Indikator berjumlah dan berkualitas cukup baik dan dapat dilihat membawa dampak positif pada pemanfaatan egovernment masih namun diperlukan perbaikan perbaikan untuk menjaga kelangsungan implementasi egovernment pada masa yang akan datang.
- d. Nilai 3,5 sampai dengan 4,0 (sangat baik). Indikator baik dari segi jumlah maupun kualitas sangat baik. Dampak pada penerapan e-government terlihat sangat nyata. Kesiapan untuk terus dikembangkan pada masa yang akan datang sudah terlihat jelas.

3. Analisa Kebutuhan Data

Data yang diperlukan guna mendukung penelitian ini dengan metoda PeGI adalah di tampilan pada Tabel 1 (terlampir).

4. Rangkuman Assesmen

Hasil asesmen secara keseluruhan yang dilakukan terhadap dinkes kota Palembang menunjukkan masih sangat kurang. Index e-government dinkes kota Palembang berada pada nilai 1,46 artinya indikator penerapan *e-government* sangat kurang dari segi jumlah maupun kualitas. Hasil asesmen secara rinci untuk masing-masing dimensi adalah sebagai berikut :

4.1. Dimensi Kebijakan

Dari dimensi kebijakan dalam penerapan *e-government* di dinkes kota Palembang “sangat kurang” yaitu ada pada point 1,25. Proses perumusan kebijakan yang berkaitan dengan TIK sudah berjalan, namun belum konsisten dan tidak terdokumentasi. Visi dinkes kota Palembang adalah

“tercapainya Palembang sehat”. Sedangkan misi dari dinkes kota Palembang adalah :

1. Meningkatkan kemitraan dan peberdayaan masyarakat
2. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia
3. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan serta sarana dan prasarana yang bermutu prima.
4. Menurunkan risiko kesakitan dan kematian.

Meskipun TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) belum disebutkan dalam visi dan misi, namun dinkes kota Palembang sedang mengembangkan jaringan infrastruktur intranet untuk pelaporan 15 puskesmas pada dinkes hal tersebut mendukung misi ketiga yaitu memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan serta sarana dan prasarana yang bermutu prima.

Pengembangan TIK pada pengembangan jaringan internet belum terdokumentasi dengan baik dan belum dilakukan secara reguler. Kebijakan terkait TIK yaitu berupa instruksi kerja no. 004/SDM/IK/01-03/2011 tentang pemuktahiran *website* dan Prosedur kerja no. 004/SDM/PK-01/2012 tentang pemuktahiran data yang ada di dinas kota Palembang. Dinas kota Palembang belum ada kegiatan manajemen risiko, evaluasi TIK, rencana induk teknologi informasi yang membuat *roadmap* kebutuhan TIK jangka panjang dan skala prioritas pengembangan TIK.

4.2. Dimensi Kelembagaan

Dimensi kelembagaan menunjukkan nilai “kurang” yaitu berada pada nilai 2,2. Bagian TIK pada dinkes kota Palembang menjadi tanggung jawab bagian seksi data dan informasi kesehatan. Seksi ini memiliki SDM sebanyak 7 orang namun latar belakang pendidikannya bukan dari TIK. Tidak ada unit lain yang berperan dalam pengelolaan TIK. Untuk sistem prosedur di bidang TIK sudah baik, tugas pokok dan fungsi yang ada sudah terdeskripsi dengan jelas dan dilaksanakan dengan baik. Berikut tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan informasi/berita/artikel dari bidang puskesmas / lintas sektor terkait
2. Melakukan *editing* terhadap informasi/berita/artikel
3. Melakukan *upload* terhadap informasi/berita/artikel di *website*
4. Mendokumentasikan *hardcopy* informasi / berita / artikel

Prosedur dan pedoman yang dimiliki terkait pengelolaan TIK adalah mengenai prosedur updating data, instruksi pemuktahiran *website*. Sayangnya *Roadmap* SIK pada kementerian kesehatan belum final. Dinkes kota Palembang juga sudah melaksanakan beberapa pelatihan terkait pemanfaatan TIK yaitu pelatihan updating data dasar kesehatan dan pelatihan updating data SIK namun belum ada program pengembangan SDM yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dibidang TIK.

4.3. Dimensi infrastruktur

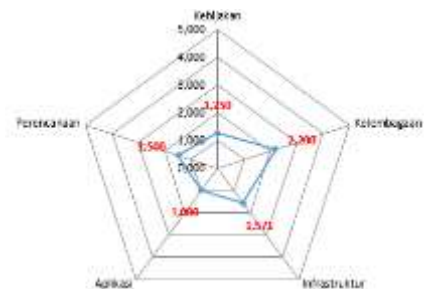
Pada dimensi infrastruktur juga masih kurang yaitu pada nilai 1,57. Dinkes kota Palembang belum memiliki *data center*. Pada saat asesmen dilakukan, dinkes kota Palembang sedang membangun jaringan intranet untuk pelaporan 15 puskesmas di kota Palembang. Untuk mekanisme keamanan, telah melengkapi infrastrukturnya dengan *firewall*, serta aspek pengamanan fisik meski hanya menggunakan kunci, tetapi perangkat pendukung belum lengkap. Perangkat pendukung yang tersedia berupa pendingin ruangan/AC dan UPS, sedangkan genset, kamera pengawas dan pemadam api belum ada. Dinkes kota Palembang juga telah memiliki jaringan antar SKPD dan akses internet terpusat yang didistribusikan. Untuk prosedur / SOP penanggulangan bencana dan *disaster recovery plan* belum dimiliki. Back up data dilakukan secara berkala / manual. Pemeliharaan infrastruktur TIK menyediakan anggaran sebesar 150 juta rupiah per tahun yang berasal dari APBD, tetapi program pemeliharaan infrastruktur belum terdokumentasi dengan baik. Pemeliharaan *web server* diberikan kepada pihak ketiga. Dinkes kota Palembang memiliki dua orang admin yang bertugas untuk mengupdate konten *website*. Daftar inventaris barang dan peralatan TIK belum ada.

4.4. Dimensi Aplikasi

Untuk dimensi aplikasi penerapan e-government di dinkes kota Palembang masih “sangat kurang” yaitu pada nilai 1. Dinkes kota Palembang telah memiliki situs resmi www.dinkes.palembang.go.id yang memiliki informasi terupdate. Website ini tidak dipelihara secara mandiri oleh melainkan melalui pemkot kota Palembang. Untuk pemeliharaan web server, dinkes kota Palembang menyerahkannya kepada pihak ketiga. Website tersebut mendukung interaktivitas dengan publik yaitu Pelayanan, pengaduan, pertanyaan komite berita. Namun website sering mengalami gangguan sehingga tidak dapat diakses oleh publik. Karena belum ada aplikasi yang mendukung fungsi dasar umum sistem pemerintahan maka belum dapat diterapkan interoperabilitas.

4.5. Dimensi Perencanaan

Pada dimensi perencanaan penerapan e-government di dinkes kota Palembang menunjukkan hasil yang “kurang” yaitu pada nilai 1,5. Unit kerja yang bertanggung jawab terhadap penyusunan perencanaan TIK pada dinkes kota Palembang adalah seksi data dan informasi kesehatan. Berikut adalah Grafik lima dimensi penerapan e-government dinkes kota Palembang



Gambar 2. Grafik lima dimensi penerapan egovernment dinkes kota Palembang

Belum ada mekanisme penyusunan perencanaan TIK, perencanaan TIK hanya sebatas mendukung layanan dinkes. Belum memiliki dokumentasi untuk perencanaan TIK dan belum ada dokumen detil dari rencana induk TIK dikarenakan rencana induk TIKnya sendiri belum final pada kementerian kesehatan.

3. Kesimpulan

Berdasarkan penilaian index e-Government pada dinkes kota Palembang yang menggunakan metode PeGI, dapat disimpulkan bahwa :

1. secara keseluruhan index e-Government pada dinkes kota Palembang adalah 1.42, yang artinya indikator penerapan e-governement pada dinkes kota Palembang masih sangat kurang sehingga perlu ditingkatkan dalam segi jumlah maupun kualitas.
2. untuk meningkatkan index e-Governement nya, dinas kota Palembang perlu melakukan perbaikan pada dimensi aplikasi, perencanaan, kebijakan dan infrastruktur yaitu dengan Penyusunan Rencana Induk Teknologi Informasi (RITI), Penyusunan skala prioritas kebijakan implementasi TIK, Penambahan jumlah staf pada seksi data dan informasi kesehatan dengan latar belakang TI, Penambahan program pengembangan SDM dengan mengirimkan karyawan

di seksi data dan informasi kesehatan untuk mengikuti pelatihan atau pendidikan di bidang TI dan Penyusunan rencana Disaster Recovery

Daftar Pustaka

[1] A. Budi Pratama, "Implementasi E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Era Globalisasi," 2005.
 [2] Kominfo, Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 07/SE/M.KOMINFO/10/2011 Tentang Pemingkatan e-Government Indonesia (PeGI). Indonesia, 2011.
 [3] N. Faizah and D. I. Sensuse, "Faktor-faktor Sukses Implementasi E-Government di Empat Kabupaten/Kota di Indonesia," *Digit. Inf. Syst. Conf. Fak. Tek. Univ. Kristen Maranatha*, pp. 236–241, 2009.
 [4] O. Novianto and D. Puspasari, "Knowledge Management System Implementation in a Company with Different Generations : A Case Study," *Procedia - Soc. Behav. Sci.*, vol. 65, no. ICIBSoS, pp. 942–947, 2012.
 [5] Kominfo, *Pemingkatan E-Government Indonesia Kabupaten / Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012*. 2012.

Tabel 1. Analisis kebutuhan data (score rata-rata masing-masing dimensi penilaian)

No	Data	Atribut	Kriteria data	Score
1	Kebijakan	Proses Kebijakan	Adaya manajemen/proses terkait kebijakan	1
		Visi & Misi berkaitan dengan TIK	Adanya Visi dan Misi berkaitan dengan TIK	2
		Strategi penerapan kebijakan	Adanya dokumen yang memuat strategi penerapan kebijakan TIK	1
		Pedoman	Adanya Acuan-acuan untuk penerapan kebijakan TIK	1
		Peraturan	Adanya regulasi dan aturan lain yang terkait dengan TIK	1
		Keputusan Instansi	Adanya Keputusan penetapan dari pejabat instansi	2
		Skala Prioritas	Adanya Penentuan prioritas dalam kebijakan TIK	1
		Manajemen Resiko / Evaluasi TIK	Adanya evaluasi internal dan independen	1
2	Kelembagaan	Struktur Organisasi yang efektif	Adanya bagan organisasi yang sudah beroperasi secara resmi	2
		Adanya Tugas dan Fungsi	Dokumentasi tentang tugas, fungsi dari organisasi & unit-unit	3
		Sistem & Prosedur Kerja yang lengkap dan terdokumentasi	Dokumen yang menunjukkan sistem dan prosedur tata cara kerja dan pengaturan pelaksanaan tugas/kegiatan TIK	2
		Adanya SDM, jumlah & kompetensi	Inventarisasi / pendataan tenaga tenaga kerja yang lengkap	2
		Pengembangan SDM TIK	Keberadaan program pengembangan SDM bidang TIK	2
3	Infrastruktur	Data Center	a. Ketersediaan Data Center dan DRC (Disaster Recovery Center): colocation, selfmanage cloud b. Piranti keras server, system operasi, aplikasi pendukung c. Fasilitas pendukung: HVAC, power supply, bandwidth, lokasi yang aman, ruang yang memadai, ruang pendukung, tatakelola, budget d. Pemeliharaan, pengelolaan (ruang, bandwidth, infrastruktur, organisasi) dan keamanan Data center	1
		Jaringan Data	a. Ketersediaan jaringan komputer : UTP, Coax, Fiber, Wireless b. Cakupan Jaringan dalam Organisasi c. Ketersediaan perangkat keras dan lunak d. Ketersediaan akses internet (bandwidth) e. Service delivery channer : web, email, telepon / mobile phone/smart phone (mobile internet), sms, dan lain-lain	2
		Keamanan	a. Piranti keras dan piranti lunak pengamanan sistem informasi b. Ketersediaan kebijakan / Prosedur pengamanan Sistem Informasi c. Internet Sehat dan Internet Aman (dns nawala, trust+)	2
		Fasilitas Pendukung	a. Menjaga keamanan fisik : access control, deteksi asap, Sistem pemadam api, camera, cctv dll b. Ketersediaan Listrik : sistem panel, backup, ups, grouding, interferensi, dll c. HVAC : Suhu, kelembaban, raised floor, etc	2

		Disaster Recovery	a. Mitigasi dan rencana/prosedur penanggulangan insiden (disaster recovery planning) b. Fasilitas DRC c. Proses Replikasi	1
		Pemeliharaan TIK	b. Adanya pemeliharaan khusus terkait infrastruktur(h/w, s/w, telcom, fasilitas pendukung, dll) c. Memiliki prosedur perawatan dan jadwal perawatan d. Ketersediaan redundant sistem pada saat perawatan	2
		Inventaris Peralatan TIK	a. Inventarisasi dan manajemen aset (risk manajemen) b. Pemahaman tentang inventarisasi c. Pemahaman tentang asset life cycle d. Kebijakan inventarisasi dan manajemen aset e. Ditunjang SOP : Pencatatan, lokasi, tipe, penggunaan, prioritas penggunaan, pengguna, disposal (green ICT)	1
4	Aplikasi	Situs WEB (homepage)	Penyediaan informasi, interaksi dengan public	1
		Fungsional Utama	Adanya aplikasi yang mempunyai sistem fungsi pelayanan public	1
		Fungsional administrasi & manajemen umum	Adanya aplikasi dengan sistem fungsi administrasi & manajemen umum	1
		Fungsional administrasi legislasi	Adanya aplikasi dengan sistem fungsi administrasi legislasi	1
		Fungsional manajemen pembangunan	Adanya aplikasi dengan sistem fungsi manajemen pembangunan	1
		Fungsional manajemen keuangan	Adanya aplikasi dengan sistem fungsi manajemen keuangan	1
		Fungsional manajemen kepegawaian	Adanya aplikasi dengan sistem fungsimanajemen kepegawaian	1
		Dokumentasi	Adanya dokumentasi aplikasi yang digunakan (kode sumber, buku panduan, dokumen arsitektur atau desain, dokumen teknis, dokumen kebutuhan perangkat lunak, struktur data)	1
5	Perencanaan	Inventarisasi aplikasi TIK	Adanya dokumentasi mengenai inventaris aplikasi	1
		Interoperabilitas Aplikasi	Adanya kemampuan bertukar data/informasi di beberapa aplikasi	1
		Pengorganisasian/fungsi	Adanya fungsi yang melakukan perencanaan	2
		Sistem Perencanaan	Adanya mekanisme proses perencanaan yang baku	1
		Dokumentasi	Adanya dokumentasi perencanaan TIK	1
		Master Plan	Master Plan Adanya rencana detil dari Master Plan TIK	2